

## RINGKASAN

KPU Kabupaten Banyumas yang menerapkan governansi digital untuk meningkatkan efektivitas penyebaran informasi pemilu melalui platform digital. Namun pada pelaksanaannya masih terdapat kendala yaitu keterbatasan pengetahuan SDM mengenai keterbukaan informasi publik, kelengkapan data informasi pada website PPID yang belum terupdate, serta manajemen waktu dalam mengolah informasi selama pemilu yang menjadi kendala bagi tim PPID dalam mengolah dan mempublikasikan informasi melalui platform digital. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan governansi digital dalam penyebaran informasi pemilu di KPU Kabupaten Banyumas. Penelitian terkait penerapan governansi digital dalam penyebaran informasi pemilu menggunakan delapan indikator oleh Helen Margetts dan Patrick Dunleavy antara lain transparansi dan akuntabilitas, partisipasi publik, efisiensi, keamanan dan privasi, inovasi, user-centric, interoperabilitas, dan *sustainability*.

Penelitian dilakukan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara mendalam (*in depth interview*), observasi, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Banyumas dalam menerapkan governansi digital di dalam penyebaran informasi pemilu telah memenuhi 8 aspek governansi digital menurut Helen Margetts dan Patrick Dunleavy. (1) Transparansi dan Akuntabilitas, informasi kepemiluan di setiap tahapan telah diinformasikan serta pertanggungjawaban kinerja dilakukan melalui Laporan PPID dan Bakohumas; (2) User-Centric, KPU Banyumas memberikan layanan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat; (3) Interoperabilitas, platform digital KPU Banyumas telah terintegrasi dengan KPU RI dan di Supervisi KIP Provinsi Jateng serta informasi pemilu telah disampaikan secara konsisten; (4) Partisipasi Publik, tersedia fasilitas yang responsif di setiap platform digital untuk menampung pertanyaan, saran maupun keluhan dari masyarakat; (5) Efisiensi, adanya platform digital lebih efisien dalam hal anggaran serta memudahkan akses masyarakat untuk mengakses layanan informasi; (6) Keamanan dan Privasi, platform digital KPU Banyumas telah terjamin keamanan dan privasinya; (7) Inovasi, KPU Banyumas inovatif dalam menyajikan konten-konten informasi dan berkolaborasi dengan stakeholder lain untuk meningkatkan efektivitas penyebaran informasi; (8) Sustainability, KPU Banyumas memiliki komitmen untuk terus memanfaatkan teknologi dalam upaya meningkatkan efektivitas pelayanan informasi publiknya.

Kesimpulan penelitian ini yaitu KPU Kabupaten Banyumas dalam menerapkan governansi digital di dalam penyebaran informasi pemilu telah memenuhi 8 aspek governansi digital antara lain aspek Transparansi dan Akuntabilitas, User-Centric, Interoperabilitas, Partisipasi Publik, Efisiensi, Keamanan dan Privasi, Inovasi, serta Sustainability.

**Kata Kunci:** Governansi Digital, KPU Kabupaten Banyumas, Keterbukaan Informasi Publik, Pemilu

## SUMMARY

KPU Kabupaten Banyumas implements digital governance to increase the effectiveness of disseminating election information through digital platforms. However, in its implementation there are still obstacles, namely limited human resource knowledge regarding public information disclosure, completeness of information data on the PPID website that has not been updated, and time management in processing information during the election which is an obstacle for the PPID team in processing and publishing information through digital platforms. This study aims to determine how digital governance is implemented in the dissemination of election information at the KPU Kabupaten Banyumas. Research related to the implementation of digital governance in the dissemination of election information uses eight indicators by Helen Margetts and Patrick Dunleavy, including transparency and accountability, public participation, efficiency, security and privacy, innovation, user-centric, interoperability, and sustainability.

Research was conducted at the Banyumas Regency General Election Commission using a qualitative method with a descriptive approach and data collection techniques using in-depth interview methods, observation, and documentation. The results of the study show that the Banyumas Regency General Election Commission in implementing digital governance in the dissemination of election information has fulfilled 8 aspects of digital governance according to Helen Margetts and Patrick Dunleavy. (1) Transparency and Accountability, election information has been informed and accountability is carried out through PPID and Bakohumas Reports; (2) User-Centric, KPU Banyumas provides information services that are accessible; (3) Interoperability, the digital platform has been integrated with KPU RI and supervised by KIP Central Java Province, election information has been delivered consistently; (4) Public Participation, responsive facilities are available on each digital platform to accommodate questions, suggestions and complaints from the public; (5) Efficiency, the existence of a digital platform is more efficient in terms of budget and makes it easier for the public to access information services; (6) Security and Privacy, the digital platform has guaranteed security and privacy; (7) Innovation, KPU Banyumas is innovative in presenting information content, collaborating with other stakeholders to increase the effectiveness of information dissemination; (8) Sustainability, KPU Banyumas is committed to continuing to utilize technology in an effort to increase the effectiveness of its public information services.

The conclusion of this study is that the KPU Kabupaten Banyumas in implementing digital governance in the dissemination of election information has fulfilled 8 aspects of digital governance including aspects of Transparency and Accountability, User-Centric, Interoperability, Public Participation, Efficiency, Security and Privacy, Innovation, and Sustainability.

**Keywords:** Digital Governance, Banyumas Regency KPU, Public Information Disclosure, Election.